

Motivasi Kerja Badan Musyawarah Kampung dalam Pelaksanaan Pembangunan

Oleh:

¹ Hesty Tambajong; ² Dewi Putri Anjar Wulan

¹. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus

². Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Musamus

Email. hestytambajong@yahoo.co.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kerja dari peran Badan Musyawarah Kampung (Bamuskm) di Kampung Yanggandur dan Kampung Kuper serta mengenali faktor yang memberikan dampak kepada peran Badan Musyawarah Kampung (Bamuskm) dalam melaksanakan pembangunan. Dengan menggunakan tipe deskriptif kualitatif yaitu tipe penelitian yang mengeksplorasi serta mengklarifikasi tentang sebuah kejadian atau fenomena dalam fakta sosial. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa motivasi kerja Badan Musyawarah Kampung (Bamuskm) di Kampung Yanggandur dan Kampung Kuper sudah cukup optimal dalam melaksanakan pembangunan di kampungnya masing-masing. Anggota Bamuskam Yanggandur dan Kuper yang termotivasi atau terdorong untuk melakukan suatu pekerjaan maka anggota tersebut akan memiliki semangat untuk mengerjakan tugasnya dalam membangun kampung. Di dalam melaksanakan pembangunan, Bamuskam menjadi wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, dan juga sebagai pengawas dari kinerja Kepala Kampung berkaitan dengan fungsi Bamuskam mengenai pengawasan. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi dan peran Badan Musyawarah Kampung (Bamuskm) melaksanakan pembangunan yang terdiri dari faktor pendukung yaitu tingkat pendidikan anggota Bamuskam pada saat proses pemilihan anggota Bamuskam, faktor masyarakat, dan juga faktor sosial budaya. Sedangkan untuk faktor yang menghambat yaitu belum adanya kantor sekretariat Bamuskam baik di Kampung Yanggandur maupun di Kampung Kuper.

Kata Kunci: Motivasi; Bamuskam; Pembangunan.

Abstract

This article aims to determine the work motivation of the role of the Village Deliberative Council (Bamuskm) in Yanggandur and Kuper villages and to identify factors that have an impact on the role of the Village Deliberative Council (Bamuskm) in implementing development. By using a qualitative descriptive type, namely the type of research that explores and clarifies an event or phenomenon in social facts. The results obtained indicate that the work motivation of the Village Deliberative Council (Bamuskm) in Yanggandur and Kuper villages is optimal in carrying out development in their respective villages. Members of the Yanggandur and Kuper Bamuskam who are motivated or compelled to do a job will have the enthusiasm to do their job in building the village. In carrying out development, Bamuskam becomes a forum for accommodating and channeling community aspirations, and also as a supervisor of the performance of the Village Head in relation to the Bamuskam function regarding supervision. In addition, there are several factors that affect the function and role of the Village Deliberative Council (Bamuskm) in carrying out development which consists of supporting factors, namely the education level of Bamuskam members during the selection process for Bamuskam members, community factors, factors of cooperation with village officials, and social factors culture. As for the inhibiting factor, namely the absence of a Bamuskam secretariat office both in Yanggandur Village and Kuper Village.

Keywords: motivation; Bamuskam; development.

PENDAHULUAN

Kampung merupakan lapisan pemerintahan yang seringkali dilupakan oleh perhatian khalayak ramai terutama dari segi pemerintahan. Jika dipahami lebih lanjut, kampung merupakan lapisan yang langsung melekat dengan masyarakat. Kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang paling lemah. Dari pepatah tersebut jika dikaitkan dengan sistem pemerintahan, maka rangkaian pemerintahan dimulai dari pusat, daerah, dan kampung. Kampung lah yang menjadi mata rantai paling lemah. Maka pemerintah pusat harus lebih melirik pada pemerintah Kampung agar tercapai cita-cita bersama.

Dalam rangka mengatur dan mengurus masyarakat di Kampung guna melaksanakan kewenangan yang dimiliki, maka dibentuk suatu badan di kampung yang disebut Badan Musyawarah Kampung yang kemudian disingkat sebagai Bamuskam yang bertugas sebagai lembaga legislasi dalam menetapkan peraturan kampung serta menjadi wadah penampung dan penyalur aspirasi masyarakat bersama-sama dengan Kepala Kampung. Hakikatnya lembaga ini merupakan mitra kerja dari pemerintah kampung yang kedudukannya sama dalam urusan pemerintah, pembangunan kampung, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah sangat ditentukan dan didukung oleh pemerintah kampung serta perangkat kampung lainnya yaitu Badan Permusyawaratan Kampung (Bamuskam). Pemerintah kampung dalam hal ini Bamuskam tentu membutuhkan motivasi kerja dalam melaksanakan perannya guna meningkatkan pembangunan.

Mengutip dari Winantris (2018) yang memiliki pendapat bahwa motivasi kerja merupakan suatu keadaan yang memiliki pengaruh untuk mengarahkan, membangkitkan, serta menjaga sikap yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Istilah motivasi mempunyai arti beragam baik yang berhubungan langsung dengan sikap individu ataupun sikap organisasi. Dengan kata lain, motivasi adalah hal utama di dalam diri seseorang yang memiliki peran dalam menciptakan keberhasilan suatu organisasi, ini tercantum dalam Wulan & Alam (2018).

Menurut Hamid & Kurniawaty (2020), motivasi ialah sebagai kondisi dimana kemauan serta usaha seseorang yang diarahkan guna mencapai hasil tertentu. Motivasi adalah masalah yang kompleks dan beragam dalam organisasi, hal ini dikarenakan kebutuhan serta keinginan dari setiap anggota organisasi berbeda. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan suatu hal yang mengarahkan kita untuk berbuat, mendorong kita agar tetap berbuat dan mengarahkan kemana perbuatan kita akan menuju. Menurut Tambajong (2016), motivasi seringkali diartikan sebagai dorongan. Sehingga motivasi ini adalah penggerak bagi seseorang untuk bertindak serta mempunyai tujuan tertentu terhadap perbuatannya.

Bamuskm memiliki fungsi sebagai pengawasan terhadap kinerja kepala Kampung. Pengawasan yang dimaksudkan ini adalah salah satu alasan penting dibentuknya Bamuskam. Kegiatan pengawasan ditujukan untuk mengurangi adanya

penyalahgunaan wewenang serta keuangan Kampung di dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung, berdasarkan artikel Badilla & Pandiangan (2020). Menurut Wulan & Muafa (2020), di Papua khususnya Merauke terdapat Kampung Yanggandur dan Kampung Kuper. Kampung Yanggandur merupakan kampung yang mayoritas warganya adalah suku asli dari daerah tersebut yaitu Papua. Sedangkan Kampung Kuper merupakan kampung yang mayoritas warganya adalah suku dari luar Papua yang mendiami kampung tersebut.

Disinilah kemampuan atau kapabilitas dari anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskm) digunakan dalam menjalankan fungsi dan kewajibannya. Urusan Pemerintah Kampung dapat berjalan dengan sesuai jika terdapat kerjasama yang efektif dan efisien antara Aparat Kampung dengan Bamuskam. Anggota Bamuskam dituntut agar memiliki wawasan yang luas dalam hal pengetahuan, pengalaman, keterampilan, maupun sikap. Pengetahuan serta keterampilan seseorang untuk turun langsung dalam pelaksanaan Pemerintahan Kampung memiliki pengaruh terhadap keahlian seseorang, seseorang dalam hal ini yaitu Anggota Bamuskam yang mampu menampung masukan dari masyarakat serta mengambil keputusan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Merauke Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Badan Permusyawaratan Kampung Tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan atau yang disingkat dengan Bamuskam merupakan mitra atau rekan kerja dari pemerintah kampung yang saling mendukung dalam rapat atau musyawarah serta membahas bersama mengenai peraturan pembangunan di Kampung. Bamuskam mempunyai tugas bersama kepala kampung guna merencanakan serta menetapkan kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan fisik. Bamuskam berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.

Bamuskm memiliki fungsi dalam membuat Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung serta menjadi wadah penampung dan penyalur aspirasi atau pendapat masyarakat. Badan Musyawarah Kampung memiliki tugas dan wewenang dalam membahas rancangan Peraturan Kampung bersama dengan kepala Kampung; melakukan pengawasan dalam melaksanakan peraturan Kampung dan peraturan kepala Kampung; menjadi pengusul dalam pengangkatan maupun pemberhentian kepala Kampung; membentuk panitia sebelum diadakannya pemilihan kepala Kampung; menelusuri, mewadahi, memadukan, menginterpretasikan, dan mendistribusikan atau menyampaikan aspirasi masyarakat; memelihara dan mempertahankan kelestarian adat istiadat di masyarakat selama membantu pembangunan dan kesejahteraan warga Kampung; memberikan pandangan kepada kepala Kampung tentang kesepakatan kerjasama yang mengenai kepentingan masyarakat maupun Kampung; memberikan saran atau rekomendasi kepada kepala Kampung dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan pembangunan Kampung; memberikan kesepakatan tertulis terhadap kredit atau pinjaman yang nantinya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam); membuat tata tertib Bamuskam.

Bamuskam mempunyai hak yaitu menagih laporan Kepada Kepala Kampung atas penyelengaraan sistem pemerintahan Kampung; mengemukakan pendapat. Sedangkan kewajiban dari Badan Musyawarah Kampung adalah: mengamalkan Pancasila, mematuhi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan; melakukan kehidupan demokrasi dalam pengaturan pemerintahan Kampung; menerima, mewadahi, menyatukan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat; bersama dengan Kepala Kampung membuat rancangan strategis bagi Kampung dan rencana jangka menengah sebagai tolak ukur pembangunan selama lima tahun serta satu tahun yang disesuaikan dengan kapasitas dan prospek Kampung; memelihara norma serta etika dalam hubungan kerja bersama dengan lembaga yang ada pada masyarakat.

Permasalahan yang dialami oleh Bamuskam yang berada di Wilayah Papua saat ini baik Kampung Yanggandur maupun Kampung Kuper, yaitu anggota Bamuskam tidak begitu mengetahui peran serta fungsinya di kampung yang mengakibatkan kurang tercapainya tujuan dari Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) sebagai lembaga yang dibutuhkan guna mendampingi Pemerintahan Kampung di bidang pembangunan. Hal ini berakibat banyak pendapat dari masyarakat yang tidak dapat diserap dengan baik yang kemudian berpengaruh kepada proses pembangunan yang berjalan lamban. Kendala utama dari permasalahan ini adalah kemampuan para Anggota Badan Musyawarah Kampung yang terbatas. Ini dapat dilihat dari beberapa Anggota Badan Musyawarah Kampung yang jarang mengikuti pertemuan rutin dalam membahas rencana pembangunan, dalam melaksanakan pembangunan ataupun pertemuan evaluasi hasil pembangunan. Selain itu, jalinan komunikasi yang dirasa masih kurang efektif antara Anggota Bamuskam dengan Aparat Kampung yang menyebabkan ketidak akuratan dalam pembangunan, pengetahuan dan wawasan anggota Bamuskam yang tidak merata sehingga sering terdapat perbedaan dalam memandang dan memahami suatu masalah. Berdasarkan masalah yang diuraikan tersebut menampakkan minimnya motivasi kerja Badan Musyawarah Kampung dalam menjalankan perannya terhadap pembangunan. Peran terpenting dari Bamuskam yaitu legislasi, pengawasan, mengayomi, dan menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat, dirasa kurang mampu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga artikel ini bertujuan untuk mengetahui motivasi kerja dari peran Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Kampung Yanggandur dan Kampung Kuper serta mengenali faktor-faktor yang memberikan dampak kepada peran Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dalam melaksanakan pembangunan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan observasi mendalam ke lapangan guna mendapatkan data-data maupun fakta lapangan dengan cara wawancara langsung bersama informan maupun mengamati kondisi atau keadaan yang erat kaitannya dengan informan. Dalam artikel ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai motivasi kerja Badan Musyawarah

Kampung (Bamus kam) dalam melaksanakan pembangunan di Kampung Yanggandur dan Kampung Kuper. Dalam artikel ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang didapat dari informan yang telah melalui proses penyaringan dan pemilihan berdasarkan daerah cakupan dalam artikel ini. Data primer didapat dengan cara observasi secara langsung pada objek yang menjadi sasaran dan melalui wawancara terfokus mengenai permasalahan yang dimaksud. Sedangkan data sekunder, dapat diperoleh dari media masa, penelusuran data online, dan artikel-artikel yang terkait. Badan Musyawarah Kampung (Bamus kam), Pemerintah/Aparatur Kampung, dan masyarakat terkait pelaksanaan peran Badan Musyawarah Kampung merupakan subjek dalam artikel ini, metode yang digunakan yaitu *Purposive Sampling*, dengan pimpinan dari setiap perangkat menjadi informan. Artikel ini menerapkan *interactive analysis*. Model ini memiliki tiga unsur analisis yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilahan, pemuatan, pelugasan, dan abstraksi data. Hasil yang diperoleh yaitu data dapat dilugaskan atau disederhanakan, dan ditransformasikan atau disalurkan melalui pemilahan yang ketat, penyederhanaan serta penggolongan dalam satu pola. Penyajian data merupakan rangkaian informasi yang dimungkinkan untuk ditariknya kesimpulan sehingga akan mudah dipahami apa yang sedang dialami serta apa yang harus ditindaklanjuti. Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan sejak pertama pengumpulan data, harus dipahami betul apa yang menjadi bidang fokusnya, dengan cara mencatat peraturan, gambaran-gambaran, pernyataan konfigurasi yang terpercaya maupun arahan penyebab maupun pengaruh dan dampak sehingga pengambilan kesimpulan menjadi lebih mudah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan motivasi kerja Badan Musyawarah Kampung (Bamus kam) dalam pelaksanaan pembangunan di kampung Yanggandur dan Kampung Kuper. Motivasi adalah bagian dari beberapa faktor yang akan mempengaruhi kinerja dari individu maupun kelompok. Motivasi kerja terkadang dapat bersumber dari keperluan akan materi/uang, kekuasaan, pengakuan, dan penghargaan. Motivasi eksternal dapat berasal dari keluarga, rekan kerja ataupun atasan. Di dalam organisasi, seorang atasan merupakan penggerak organisasi tersebut, baik manusia maupun non manusia. Maka dari itu, seorang atasan seharusnya mampu memahami faktor-faktor apa saja yang mampu meningkatkan motivasi dari anggotanya. Anggota organisasi merupakan sumber daya manusia yang menentukan tercapai tidaknya tujuan dari organisasi, harus mendapatkan perhatian dalam hal pemenuhan kebutuhan.

Badan Musyawarah Kampung (Bamus kam) adalah wakil dari rakyat yang berada di kampung. Bamus kam ini menjadi wadah untuk rakyat atau warga di kampung dalam menyuarakan aspirasi mereka dan juga untuk menampung semua keluhan dari masyarakat yang nantinya akan ditindak lanjuti untuk dapat disampaikan kepada instansi maupun lembaga-lembaga terkait. Kinerja dari Bamus kam (Badan Musyawarah

Kampung) di Papua terkhusus di Kampung Yanggandur dan juga Kampung Kuper sudah dapat dikatakan baik. Bamuskam dari masing-masing kampung telah mampu melaksanakan tugas dan juga tanggung jawab mereka dengan berpedoman dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Namun yang terlihat di lapangan, kinerja dari Bamuskam Kampung Yanggandur masih sedikit tertinggal jika dibandingkan dengan Kampung Kuper, hal ini disebabkan oleh sarana yang kurang mencukupi. Kedua Bamuskam ini telah sama-sama memiliki motivasi dalam hal peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan juga tanggung jawab yang telah diberikan, Wulan (2018).

Di dalam motivasi kerja terdapat beberapa indikator seperti yang diuraikan pada pendahuluan. Indikator yang pertama yaitu gaji. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bamuskam di kedua kampung yaitu Kampung Yanggandur dan Kampung Kuper, gaji yang diperoleh ketua Bamuskam kurang lebih sekitar Rp 950.000, sekretaris Bamuskam Rp 800.000, dan anggota Bamuskam Rp 750.000 sedangkan gaji kepala Kampung kurang lebih Rp 1.700.000 dengan pembayaran gaji dilakukan per semester (6 bulan). Sejalan dengan artikel dari Pham (2020) yang mengatakan bahwa gaji yang tinggi dapat mempertahankan dan memotivasi karyawannya. Nominal dan sistem pembayaran gaji tersebut yang menyebabkan penurunan motivasi dari anggota Bamuskam dalam melaksanakan fungsinya guna membangun kampung. Hal ini sangat dirasakan oleh Bamuskam di kampung Yanggandur, dimana semuanya serba terbatas dan mayoritas pekerjaan mereka yang hanya berfokus pada Bamuskam ini sehingga tdk ada pemasukan lainnya.

Di dalam motivasi kerja terdapat beberapa indikator menurut teori dalam buku Sedarmayanti yang termuat dalam artikel Wulan & Alam (2019) yang pertama adalah gaji. Gaji merupakan faktor utama guna memenuhi keperluan diri sendiri serta keluarganya. Gaji juga menjadi pendorong bagi pegawai sehingga dapat bekerja dengan baik dan semangat. Situasi yang terjadi di lapangan, gaji yang diterima oleh ketua Bamuskam lebih rendah dibanding dengan gaji aparatur kampung lainnya, seperti Kepala Kampung yang menyebabkan anggota Bamuskam kurang termotivasi untuk melaksanakan fungsi dan perannya dalam pembangunan kampung. Faktor lain guna memenuhi keberhasilan suatu organisasi dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan adalah dengan adanya kebijakan serta administrasi. Keselarasan diantara pimpinan dan bawahan menjadi motivasi tersendiri dalam melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan optimal tertuang dalam Tambajong & Nahruddin (2019). Sesuai fakta di lapangan, masih terdapat kesenjangan antara atasan dengan bawahan dalam hal ini yaitu ketua Bamuskam dengan anggotanya sehingga masih ada anggota yang kurang berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang diadakan.

Indikator motivasi yang kedua yaitu kebijakan serta administrasi, dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan serta administrasi Bamuskam baik di kampung Yanggandur dan Kampung Kuper perlahan mulai dibenahi. Keselarasan diantara Ketua Bamuskam dengan anggota Bamuskam telah terjalin dengan harmonis, begitu pun anggota Bamuskam dengan aparatur kampung lainnya sehingga sejalan

dengan hasil penelitian dari Nguyen (2020) keberhasilan suatu organisasi dalam meraih tujuan yang telah ditetapkan adalah dengan adanya keselarasan diantara pimpinan dan bawahan. Indikator motivasi yang ketiga yaitu hubungan kerja, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja telah terjalin dengan baik antara pihak Bamuskam dengan sesama rekan kerja maupun dengan masyarakat kampung yang mereka layani. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kinerja dari kedua Bamuskam baik Kampung Yanggandur maupun Kampung Kuper. Hubungan kerja yang baik di tempat kerja maupun di luar lingkungan kerja akan selalu dibutuhkan dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial. Manusia akan saling membutuhkan satu dan lainnya baik dalam hal cinta, kasih sayang, persahabatan, maupun perasaan memiliki serta diterima oleh keluarga, kelompok, dan organisasi. Seorang pegawai dapat betah dengan pekerjaannya jika kondisi atau keadaan kerja yang aman, nyaman, serta tenang dan didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Permasalahannya masih minim sarana dan pra sarana. Belum terdapat komputer maupun printer sebagai pendukung pekerjaan Bamuskam. Komputer yang tersedia hanya 1 unit pada kantor Kampung sehingga apabila Bamuskam ingin membuat surat maupun pelaporan kegiatan lainnya harus menumpang komputer pada kantor Kampung.

Indikator motivasi yang keempat adalah kondisi kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kerja kampung Kuper sudah menunjang ditambah dengan didukungnya peralatan penunjang dalam melayani yang cukup lengkap. Namun, berbanding terbalik dengan Bamuskam Kampung Yanggandur yang masih belum memiliki cukup peralatan yang menunjang kinerjanya seperti komputer dan printer. Indikator yang kelima yaitu pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan dalam Bamuskam dapat menjadi motivasi tersendiri untuk meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, anggota Bamuskam baik di Kampung Yanggandur dan kampung Kuper selalu berusaha dalam membantu permasalahan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Ada motivasi di dalam diri anggota Bamuskam ini untuk senantiasa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat. Hal ini mereka lakukan atas dasar Perbup Merauke No. 4 Tahun 2014. Dengan menjadi salah satu pengurus Bamuskam seseorang dapat membantu menampung permasalahan atau aspirasi dari masyarakat sekaligus dapat mendorong untuk mengembangkan potensi diri sendiri maupun memperluas jaringan yang dimiliki sehingga dapat dengan mudah mengerjakan pekerjaannya. Dengan menjadi salah satu bagian dari Bamuskam dapat menjadikan satu kebanggaan tersendiri dari seseorang. Ini merupakan indikator keenam dari motivasi kerja, yaitu pengakuan dan penghargaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka (anggota bamuskam Yanggandur dan Kuper) lebih dihargai oleh masyarakat sekitar yang pada akhirnya akan meningkatkan motivasi kerja dan juga kinerja dari Bamuskam ini sendiri. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmawati, Cepi Pahlevi, and Mursalim Nohong. 2020 yang mengatakan bahwa motivasi yang berguna sebagai performa tinggi yaitu pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan atau tugas yang dapat dicapai targetnya, yang menarik namun tetap memberikan tantangan tersendiri lah yang menjadi motivasi bagi

pegawai dalam melakukan pekerjaan. Indikator motivasi yang terkahir atau ketujuh yaitu tanggung jawab. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Bamuskam Kampung Yanggandur dan juga Kampung Kuper telah mampu menjalankan peran dan juga tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka dengan baik, sesuai dengan tupoksi mereka masing-masing serta sesuai arahan yang diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan artikel dari Wulan & Alam (2018) yang mengatakan bahwa tanggung jawab adalah pelaksanaan pekerjaan yang dibebankan atau ditugaskan dengan semaksimal mungkin yang sesuai dengan arahan atau petunjuk yang diberikan.

Peran Bamuskam Dalam Pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Bamuskam Yanggandur dan Bamuskam Kuper, keduanya memiliki struktur pemerintahan Kampung, dimana dalam struktur tersebut kedudukan Badan Musyawarah Kampung sejajar dengan komponen Pemerintah Kampung terlebih lagi merupakan mitra kerja dari Kepala Kampung. Urusan Pemerintah kedua Kampung telah berjalan dengan baik karena hubungan kerjasama yang baik pula di antara Aparat Kampung dengan Bamuskam. Hasil penelitian melalui wawancara bersama masyarakat di Kmapung Yanggandur dan Kampung Kuper mengatakan bahwa keberadaan Badan Musyawarah Kampung di dalam Pemerintahan Kampung dengan berbagai macam fungsi serta kewenangannya diharapkan dapat menciptakan sistem timbal balik bagi pemerintahan kampung. Sebagai wujud kerakyatan di dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung, Kepala Kampung dan Badan Musyawarah Kampung harus dapat bekerja bersama pada saat membenahi maupun menata kepentingan warga setempat. Dalam pelaksanaan fungsi dan peran Bamuskam selaku badan legislatif kampung serta wadah dari suara masyarakat yang diharapkan bisa terlaksana dengan efektif dan efisien. Hasil penelitian di kedua kampung yaitu pemerintah kampung dan Bamuskam mampu bekerjasama dengan baik dalam penyelenggaraan pemerintah yang tentunya atas dorongan dari masyarakat ini sendiri.

Kepala Kampung di dalam menjalankan pemerintah kampung berhak pula untuk menetapkan keputusan. Keputusan Kepala Kampung ditetapkan guna memperlancar proses Peraturan Kampung dalam Nikodimus, Gradila Apriani, and Petrus Atong. (2020). Fungsi dan peran Bamuskam yaitu mengawasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kampung. Segala model kegiatan senantiasa ditinjau serta diawasi oleh Bamuskam baik secara langsung ataupun tidak langsung. Hal tersebut dilaksanakan guna mengetahui apakah terdapat penyelewengan peraturan maupun tidak. Informasi yang didapat dari lapangan tentang pengawasan Bamuskam terhadap penyelenggaraan peraturan Kampung yaitu telah adanya kesesuaian peraturan Kampung dengan apa yang diterapkan, hal ini membuktikan bahwa Bamuskam di Kampung Yanggandur dan Kampung Kuper telah melaksanakan fungsi dan perannya dengan baik. Namun, apabila terjadi penyelewengan peraturan oleh masyarakat di kedua kampung ini, maka Bamuskam akan memberikan teguran atau nasihat secara langsung maupun arahan dengan cara yang baik. Jika telah menggunakan cara tersebut

namun tidak juga mendapatkan solusi, maka Bamuskam kemudian membicarakan persoalan ini bersama dengan pemerintah kampung serta tokoh masyarakat yang lain.

Hasil penelitian pada Bamuskam Kuper terdapat 2 (dua) Peraturan Kampung yang telah dibuat oleh Bamuskam, yang pertama tentang ketertiban umum dan kebersihan dan peraturan kampung yang kedua mengenai penyewaan aset kampung. Kedua perkam ini telah disepakati dalam musyawarah kampung, telah dibuat dalam bentuk buku, dan sedang menunggu persetujuan atau pengesahan dari Bupati kabupaten Merauke. Peraturan kampung yang dibuat oleh Bamuskam Kuper ini dirasa sangat menunjang terlaksananya pembangunan kampung yang sejalan dengan penelitian dari Rustomi (2020). Peraturan kampung atau biasa disingkat dengan nama Perkam ini merupakan jenis hukum paling tinggi yang diterbitkan oleh pemerintah kampung yang memiliki sifat mengatur. Peraturan ini dibuat atas dasar usul dari Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) ataupun usul dari kepala kampung yang kemudian disepakati secara bersama serta dikukuhkan atau ditetapkan oleh kepala kampung lalu diinformasikan kepada warga dalam bentuk berita kampung yang dirancang baik sebagai pelaksanaan maupun sebagai pemapar peraturan perundang –undangan yang berada di atasnya dengan kata lain lebih tinggi guna menyelenggarakan pemerintahan kampung. Menurut hasil penelitian yang dilakukan pada Kampung Yanggandur dan Kampung Kuper, diperoleh prosedur perancangan Peraturan kampung yang umumnya dilakukan sebagai berikut :

Pertama, rumusan peraturan kampung yang telah dibuat oleh Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) ataupun oleh Kepala Kampung, kemudian disampaikan oleh ketua Bamuskam kepada semua anggota Bamuskam paling lambat tujuh hari sebelum rumusan peraturan kampung itu dibicarakan pada saat rapat paripurna. Kedua, pengkajian mengenai rumusan peraturan dilakukan oleh Bamuskam bersama kepala kampung. Ketiga, rumusan peraturan bisa diambil atau ditarik kembali sebelum dikaji bersama oleh Bamuskam dan kepala kampung. Keempat, rumusan peraturan kampung yang telah disepakati bersama antara Bamuskam dan Kepala Kampung dapat disampaikan oleh ketua Bamuskam kepada warga kampung yang kemudian dikukuhkan menjadi peraturan kampung untuk jangka waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal pengukuhan bersama. Kelima, rumusan peraturan kampung tidak diperkenankan bertentangan dengan kepentingan atau relevansi umum dan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya atau lebih tinggi. Keenam, peraturan kampung resmi diberlakukan setelah diumumkan pada berita kampung. Hasil ini pun didukung oleh Perbup Merauke No. 4 Tahun 2014 Bab VII tentang tata cara penetapan peraturan kampung.

Dalam penyusunan peraturan kampung akan terlebih dulu disimak berdasarkan hal-hal apa yang menjadi aspirasi / suara warga kampung serta apa yang merupakan kebutuhan di kampung baik Kampung Yanggandur maupun Kampung Kuper. Lalu dari pendapat warga yang disampaikan itu, kemudian dibicarakan dalam rapat internal oleh Bamuskam apakah pendapat warga ini perlu dijadikan Peraturan Kampung (PerKam)

ataukah tidak. Setelah itu, dikemukakan dalam rapat pertemuan bersama kepala kampung. Sedangkan prosedur dalam mengukuhkan peraturan kampung memiliki beberapa tahapan yang ditempuh oleh Bamuskam yaitu mengumpulkan pendapat - pendapat baik yang bersumber dari Bamuskam ataupun dari Kepala Kampung dimana pendapat tersebut dapat dijadikan dasar atau petunjuk dalam menjalankan Pemerintahan Kampung. Setelah itu, pendapat tersebut diulas serta dievaluasi sebelum dilaksanakan penetapan atau pengukuhan Peraturan Kampung (PerKam).

Pada tahap pembuatan Peraturan Kampung diantara Kampung Yanggandur dan Kampung Kuper, pendapat atau ide berasal lebih banyak dari Kepala Kampung dibanding dari Bamuskam. Hal ini disebabkan oleh faktor pengetahuan atau wawasan Bamuskam yang dinilai masih kurang. Selain itu juga karena Kepala Kampung yang telah mengetahui lebih banyak mengenai kondisi, keadaan, dan situasi di kampung tersebut. Pada saat proses penyusunan Peraturan Kampung (PerKam) sejak dari awal merancangkan sampai dengan mengesahkan Peraturan Kampung, tidak ditemui adanya kendala maupun hambatan berarti.

Masyarakat di Kampung Yanggandur dan Kampung Kuper merupakan masyarakat yang memiliki kompleksitas kebutuhan. Seiring dengan persoalan tersebut, mereka memerlukan pelayanan yang berkualitas dari pemerintah kampung setempat yang mesti senantiasa ditingkatkan kemampuannya guna mendapatkan pelayanan yang semakin baik sesuai dengan keinginan masyarakat, Maturan Albertus Yosep, Adrianus Aprilius, and David Laiyan (2019). Salah satu peran dari Badan Musyawarah Kampung yaitu menjadi wadah serta menyalurkan pendapat atau aspirasi masyarakat. Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) sebagai wakil rakyat di kampung merupakan sarana bagi masyarakat kampung guna menyalurkan pendapatnya ataupun keluhannya yang kemudian ditindaklanjuti sampai kepada instansi atau lembaga terkait. Masyarakat juga memerlukan adanya wawasan mengenai keberadaan serta peran Bamuskam. Setelah satu Peraturan Kampung disepakati, kemudian kepala kampung memberikannya CamatKepala Distrik yang kemudian diteruskan kepada Bupati yang nantinya digunakan sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan di lapangan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Badan Musyawarah Kampung dalam pelaksanaan pembangunan.

Faktor pendukung

Berdasarkan hasil penelitian pada bamuskam Yanggandur dan Kuper, faktor pendukung yang pertama adalah jenjang pendidikan anggota Bamuskam. Ketua Bamuskam di Kampung Kuper memiliki tingkat pendidikan yaitu D-3 (diploma 3) Teologi. Sehingga pengetahuan dari ketua bamuskam Kuper cukup luas. Sedangkan ketua Bamuskam di Kampung Yanggandur memiliki tingkat pendidikan SMA. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia di kampung tersebut dan juga akses yang cukup jauh menuju ke kota Merauke yang dimana Perguruan Tinggi hanya berada di pusat kota, menyebabkan tingkat pendidikan di Kampung Yanggandur masih rendah. Belum adanya warga kampung Yanggandur yang memiliki gelar sarjana, akan tetapi

terdapat beberapa pemuda-pemudi yang sedang menempuh jenjang pendidikan sarjana dan diharapkan mereka menjadi pencetus serta contoh bagi warga lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan disana dengan metode wawancara menunjukkan pengetahuan ketua Bamuskam Yanggandur ini cukup baik untuk tingkat pendidikan SMA dan yang paling utama serta membanggakan sebagai faktor pendukung motivasi Bamuskam di Kampung Yanggandur ini adalah ketua Bamuskam merupakan orang asli Papua. Tingkat pendidikan sebagai faktor pendukung ini sejalan dengan hasil penelitian dari Amin (2019) yang mengatakan bahwa Jenjang pendidikan adalah salah satu faktor yang bisa memberikan dampak pada proses berjalannya roda pemerintahan.

Anggota Bamuskam juga memiliki wawasan yang luas baik pengetahuan, pengalaman, keterampilan maupun sikap dalam menangani aspirasi dari masyarakat serta dalam mengambil keputusan kampung dalam musyawarah, sehingga sesuai dengan keinginan dan aspirasi dari masyarakat. Hal tersebut yang menyebabkan masyarakat mempercayai orang-orang yang menjadi anggota Bamuskam. Orang – orang ini adalah pilihan masyarakat yang telah dikenal serta dapat diukur kemampuan yang mereka miliki bisa dipastikan bahwa tidak adanya nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait karena pemilihan dilakukan langsung oleh masyarakat. Orang-orang yang terpilih untuk memangku jabatan Bamuskam ini adalah orang yang dirasa memiliki kemampuan baik dari segi pendidikan, maupun besar pengaruhnya di masyarakat. Maksudnya adalah dapat bekerjasama serta dapat memahami dan mengerti persoalan yang ada di kampung.

Faktor pendukung kedua adalah masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masyarakat menjadi faktor yang menentukan keberhasilan Bamuskam dalam menjalankan perannya. Dukungan dan penghargaan yang besar dari masyarakat kepada Bamuskam, membuat Bamuskam memiliki keleluasaan dalam melaksanakan perannya. Masyarakat sangat mendukung segala kegiatan Bamuskam, hal ini dapat dilihat dari banyaknya aspirasi yang diberikan oleh masyarakat dan juga dengan ikut terlibat atau berpartisipasi dalam terlaksananya suatu Perkam. Suatu peraturan atau keputusan Bamuskam dan Aparat Kampung dengan mudah dapat terlaksana karena adanya keinginan dan motivasi baik dari anggotanya sendiri maupun dari masyarakat. Inilah yang menjadi penentu dari keberhasilan fungsi Bamuskam yang berjalan dengan baik.

Demi terwujudnya keefektifan suatu organisasi tidak lepas dari berbagai faktor. Faktor-faktor inilah yang akan mempengaruhi kinerja organisasi tersebut dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Wulan (2018). Tidak semua masyarakat dapat menerima segala keputusan yang dibuat oleh Bamuskam beserta Aparat Kampung. Terdapat beraneka ragam respon dari masyarakat, ada yang pro dan ada yang kontra dengan peraturan tersebut. Adanya respon yang kontra ini, tentu dapat menghambat kinerja Bamuskam dalam penerapan peraturan yang akan ditetapkan. Kesejahteraan kampung dapat tercapai jika seluruh elemen di dalam kampung tersebut saling bersinergi satu sama lain, baik itu Bamuskam sendiri, Aparat Kampung, maupun

masyarakat sebagai kunci utamanya dalam mendorong tercapainya hal ini, Rismawati dan Hubertus (2019). Selain itu, jika mendapat banyak dukungan dari masyarakat maka anggota Bamuskam tersebut dapat dikatakan layak.

Bentuk dukungan dari masyarakat baik di Kampung Yanggandur dan Kampung Kuper kepada Bamuskam dapat dilihat dari seberapa besar kepercayaan mereka untuk mengemukakan pendapat, keluh kesah, dan segala aspirasinya kepada Bamuskam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di kedua kampung ini sangat mempercayai Bamuskam, mereka selalu berpartisipasi apabila mendapat undangan dari Bamuskam untuk musyawarah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amin (2019) yang mengatakan bahwa besarnya kepercayaan dapat ditentukan dengan melihat jumlah pertemuan atau rapat yang dilakukan oleh Bamuskam bersama masyarakat guna membahas permasalahan yang ada di kampung dan tentunya dihadiri oleh masyarakat itu sendiri.

Faktor pendukung yang ketiga yaitu sosial budaya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, gaya hidup masyarakat baik di Kampung Yanggandur dan Kampung Kuper yang masih sangat kuat dengan budaya saling menghormati dapat memberikan pengaruh positif pada efektivitas dari penerapan fungsi dan peran Bamuskam. Adapun komitmen moral dan nilai sosial budaya yang sampai dengan saat ini masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua di Merauke khususnya adalah "*Izakod Bekai Izakod Kai*" yang memiliki arti yaitu Satu Hati Satu Tujuan. Dimana kota Merauke ini memiliki beragam suku, budaya, bahasa, sehingga dapat dikatakan Indonesia kecil berada di Merauke. Namun dengan keberagaman tersebut, semua menyatukan hati dan tujuan yang sama sehingga tercapai tujuan yang telah disepakati. Dengan menjaga keharmonisan hubungan antara Bamuskam dan Aparat Kampung dengan saling menghargai dan menghormati. Dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dan kampung, maka diperlukan adanya keharmonisan ini, Fitriani (2018). Bamuskam dan Aparat Kampung lainnya saling menyadari bahwa mereka merupakan mitra yang erat kaitannya dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dan memiliki kedudukan yang sejajar diantara keduanya.

Faktor penghambat

Berdasarkan hasil penelitian pada bamuskam Yanggandur dan Kuper, terdapat beberapa faktor yang merupakan penghambat dari motivasi kerja Bamuskam dalam menyelenggarakan pembangunan, yaitu: Pertama, minimnya keterlibatan anggota Bamuskam di kedua kampung ini dalam mengikuti rapat. Penyebab adanya faktor penghambat ini berkaitan dengan indikator – indikator motivasi kerja yang telah dipaparkan di atas. Sebagaimana diketahui bahwa dalam menentukan dan menetapkan kebijakan Kampung sangat memerlukan campur tangan atau keterlibatan dari Bamuskam. Bamuskam sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat dan juga sebagai lembaga yang akan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan segala kegiatan masyarakat dan unsur lainnya yang terlibat dalam pembangunan kampung, maka dibutuhkan individu yang dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat

menganalisa apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan masyarakat yang kemudian dikoordinasikan bersama Aparat Kampung lainnya.

Keterlibatan Bamuskam di dalam pertemuan guna membahas aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat menjadi sangat penting, sedangkan hasil yang diperoleh dari beberapa informan mengatakan bahwa masalah yang kadang dialami oleh Bamuskam adalah kurangnya keterlibatan anggota Bamuskam sendiri dalam mengikuti rapat. Yang terlibat hanya setengah dari anggota Bamuskam. Padahal keaktifan anggota ini sangat mempengaruhi tercapainya aspirasi yang diberikan. Sejalan dengan penelitian dari Rahman (2017) yang menyatakan bahwa keterlibatan Bamuskam dalam tercapainya Pembangunan kampung yang optimal sangat dibutuhkan karena Bamuskam sebagai lembaga yang mewakili masyarakat kampung dalam menyalurkan aspirasi mereka dan sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah yang lebih tinggi.

Faktor penghambat yang kedua adalah kebutuhan akan sarana yang masih tergolong minim. Dalam penyelenggaraan tugas dan perannya sebagai Badan Musyawarah Kampung, maka dibutuhkan kantor sekretariat yang akan digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan fungsi dan peran Bamuskam mulai dari proses perencanaan sampai dengan pengadministrasian. Kantor sekretariat ini sangat dibutuhkan oleh Bamuskam mengorganisir semua kegiatan Bamuskam, selain itu juga untuk mempermudah alur komunikasi serta koordinasi antar anggota Bamuskam. Sedangkan hasil penelitian yang diperoleh yaitu baik di Bamuskam Yanggandur dan Bamuskam Kuper belum adanya prasarana berupa sekretariat. Sehingga mereka masih menumpang pada kantor kampung. Selain itu, Bamuskam di Kampung Yanggandur belum memiliki sarana penunjang seperti komputer dan printer. Sedangkan sarana ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan administrasi, seperti pembuatan surat dan sebagainya. Sedangkan di bamuskam Kuper telah memiliki komputer dan printer yang dibeli menggunakan uang iuran dari kampung itu sendiri. Faktor-faktor penghambat ini tentu saja dapat mempengaruhi motivasi kerja Bamuskam itu sendiri baik dalam administrasi secara internal maupun dalam pembangunan di kampung karena Bamuskam merupakan salah satu unsur penting dalam struktur organisasi kampung.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah motivasi kerja dapat mempengaruhi fungsi dan peran Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dalam melaksanakan Pembangunan Kampung. Antara Bamuskam Yanggandur dan Kuper, sama-sama memiliki motivasi kerja yang baik dalam melaksanakan perannya masing-masing dengan berbagai indikator motivasi kerja yaitu gaji, kebijakan dan adminstrasi, hubungan kerja, kondisi kerja, pekerjaan itu sendiri, pengakuan atau penghargaan, dan tanggung jawab. Selain itu terdapat faktor pendukung berupa jenjang pendidikan dari masing-masing anggota Bamuskam, dukungan dari masyarakat yang cukup besar, dan pola sosial dan budaya di Papua yang masih kental dengan menjunjung tinggi rasa saling

menghargai dan menghormati. Adapun faktor penghambat yaitu masih kurangnya partisipasi anggota Bamuskam dalam mengikuti rapat dan belum adanya sekretariat Bamuskam serta masih kurangnya peralatan penunjang seperti komputer dan printer. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja mempengaruhi Bamuskam dalam melaksanakan pembangunan kampung.

Saran yang dapat diberikan yaitu, sebaiknya Ketua Bamuskam baik di Kampung Yanggandur maupun di Kampung Kuper agar dapat mengkoordinasi anggota untuk selalu berpartisipasi dalam rapat guna membahas tentang kebutuhan kampungnya sendiri walaupun belum ada kantor sekretariat Bamuskam sehingga fungsi Bamuskam sebagai pengawas dapat berjalan dengan efektif dalam pembangunan kampung. Dan juga Pemerintah Daerah agar lebih memperhatikan kebutuhan dan kinerja dari Badan Musyawarah Kampung ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rustomi, R. U. S. 2020. "Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pantai Desa Kampung Baru Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus)."
- Badilla, N. W. Y., & Pandiangan, N. 2020. Pendampingan Pembuatan Peraturan Kampung di Kampung Tambat Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke. *Musamus Devotion Journal*, 2(1), 19–24.
- Amin, Aidil, And Darmini Roza. 2019. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Desa." *UNES Journal of Swara Justisia* 1(1):22–29.
- Fitriani, Ms, Albertus Yosep Maturan, Imelda Carolina Laode, Hubertus Oja, Godefridus Samderubun, David Laiyan, Fransin Kontu, and Apolus Betaubun. 2018. "Local Communities On The Frontier: Impact of Environment, Population and Socio-Economic Changes in Sota District." *1st International Conference on Social Sciences (ICSS 2018)* 226(ICSS):1353–57.
- Hamid, H., & Kurniawaty, K. 2020. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja ASN. *Jurnal Ekonomika*, 4(1), 58–67.
- Maturan, Albertus Yosep, Adrianus Aprilius, and David Laiyan. 2019. "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kampung Matara Distrik Semangga Kabupaten Merauke." *Jurnal Societas* VIII(1):1–8.
- Nguyen, Phong Thanh, Andri Yandi, and M. Rizky Mahaputra. 2020. "Factors That Influence Employee Performance: Motivation, Leadership, Environment, Culture Organization, Work Achievement, Competence And Compensation (A Study Of Human Resource Management Literature Studies)." *Dinasti International Journal of Digital Business Management* 1(4):645–62.
- Nikodimus, Gradila Apriani, and Petrus Atong. 2020. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Ekowisata Danau Jemelak." *Jurnal Societas* 9(1):67–75.
- Nurmawati, Nurmawati, Cepi Pahlevi, and Mursalim Nohong. 2020. "The Effect of Job

Promotion and Mutation on Performance of Universitas Hasanuddin Civil Servant through Job Satisfaction.” *Hasanuddin Journal of Applied Business and Entrepreneurship* 3(3):33–49.

- Pham, H., and H. Nguyen. 2020. “The Effect of Motivation and Hygiene Factors on Employees’ Work Motivation in Textile and Apparel Enterprises.” *Management Science Letters* 10(12):2837–44.
- Rahman, Ratna Efendi, and Karsiman Karsiman. 2017. “Peran Badan Musyawarah Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus Di Distrik Salawati, Kabupaten Sorong).” *Gradual* 6(2):12–29.
- Rismawati, and Hubertus Oja. 2019. “Etika Birokrasi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke.” *Jurnal Societas* VIII(1):32–42.
- Tambajong, H. 2016. Manajemen Strategi Dalam Mewujudkan Aparatur Negara Yang Profesional (Sebuah Kajian Teoritis). *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 5(1), 46–57.
- Tambajong, Hesty, and Zulfan Nahruddin. 2019. “Gender Mainstreaming In the Leadership Perspective at the Regional Government Agencies Level.” *EAS Journal of Humanities and Cultural Studies* 1(2):128–32.
- Winantris, W. Studi Deskriptif Faktor-Faktor Motivasi yang Memengaruhi Preferensi Pekerjaan Warga Usia Remaja Kampung Pasir Angling Desa Suntenjaya-Lembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(9), 799-803.
- Wulan, Dewi, Aldisa Arifudin, and Nurwijayanti. 2019. “Improvement Of Employee Performance PT PLN (Persero) Area Merauke Reviewed From Work Discipline Of Employees.” *Atlantis Press* 363(Icss):73–77.
- Wulan, Dewi Putri Anjar. 2018. “Pengaruh Disiplin Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT PLN (Persero) Area Merauke.” *Journal of Business & Management* 1(1).
- Wulan, Dewi Putri Anjar, Syamsu Alam, and Fauziah Umar. 2018. “Effect of Work Stress and Motivation to Employees and Employee Performance PT PLN (Persero) Area Merauke.” *Hasanuddin Journal of Applied Business and Entrepreneurship* 1(2):1–14.
- Wulan, Dewi Putri Anjar, and Irfan Wildzan Muafa. 2020. “Pola Pikir Masyarakat Asli Papua Dalam Peningkatan Daya Saing Perekonomian.” *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* 11(1):57–65.